



RANCANGAN RENCANA KERJA **TAHUN 2026**



Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan rahmatNya, sehingga penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 telah selesai disusun.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 21 Ayat 3, bahwa Rencana kerja PD dibuat sesuai dengan pokok dan fungsi serta mengacu pada RKPD. Renja akan berfungsi sebagai alat dalam mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang akan dijadikan pedoman Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Sesuai dengan fungsinya, maka rencana kerja, program dan kegiatan yang termuat dalam Renja harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran. Dengan telah tersusunnya Rancangan Rencana Kerja PD ini, dapat dilihat sejauh mana Kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas bagi Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penyusunan Dokumen Rancangan Rencana Kerja ini, kami menyadari masih terdapat kekurangan atau keterbatasan-keterbatasan. Untuk itu dibutuhkan saran dan masukan yang bersifat membangun dari semua pihak.

Tarempa, 21 April 2025

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas



JHON AQUARIUS PUTRA, SE., M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197301222003121 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu... 7	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	17
2.4 Review terhadap Rancangan RKPD.....	19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	32

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.....	34
3.3 Program dan Kegiatan.....	35

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas	7
Tabel 2.2	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas	13
Tabel2.3	Pengukuran Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025	17
Tabel2.4	Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.....	19
Tabel2.5	Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.....	20
Tabel3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang, yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dan mengakomodasikan, mempertimbangkan berbagai kebijakan Nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serta mempertimbangkan hasil penjangkauan aspirasi masyarakat. Konsepsi Perencanaan Pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas dan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, memuat kerangka Program/Kerja baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, menjadikan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai acuan dalam melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Adapun Tema Perencanaan Pembangunan Tahun 2026 adalah “Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Daya Saing Daerah melalui Pengembangan Pariwisata dan Perikanan yang Berbasis pada Potensi Lokal serta Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Inovatif”. Dengan prioritas pembangunan:

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesetaraan Gender serta Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur yang Merata;
3. Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Biru;
4. Mempersiapkan Tenaga Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, dan Mengembangkan Ekonomi Kreatif
5. Memperkuat Reformasi Birokrasi.;

Dokumen Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian program dan kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 4405
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 89);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anamabas Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53).

22. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 477);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 ini adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2026.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kep. Anambas Tahun 2026 adalah:

- a. Menjabarkan rencana strategis kedalam rencana operasional;
- b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan perangkat daerah;
- c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam Penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Bab I memuat mengenai latar belakang penyusunan Rancangan Rencana Kerja, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Rancangan Rencana Kerja, maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja, serta sistematika penulisan.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Bab II memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

Bab III menguraikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan dari Sekretariat DPRD.

BAB IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV menguraikan tentang rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai program dan kegiatan yang berisikan program, kegiatan, indikator, pagu indikatif dan pagu prakiraan maju tahun depan.

BAB V. PENUTUP

Bab V menyampaikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu bab ini juga memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja, sangat penting dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Hal ini diperlukan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan instansi tahun sesudahnya. Bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 juga diperlukan untuk mendapatkan berbagai informasi tentang kinerja pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja dan berbagai permasalahan yang berkembang terkait pelaksanaan Rencana Kerja tersebut.

Pada pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas melaksanakan 2 (dua) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 38.483.022.472,- dengan realisasi mencapai 73,15% dari keseluruhan anggaran dengan rincian kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Sekretariat DPRD Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
10	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
11	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya
12	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan dan Perundang-Undangan
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
13	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
16	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
17	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
18	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
19	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
20	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
21	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
22	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
23	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
25	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
26	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
27	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

8.	Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
28	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
29	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
30	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
9.	Kegiatan Layanan Administrasi DPRD
31	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
32	Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
II.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
10.	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
32	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
33	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
11.	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
34	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS
35	Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
36	Sub Kegiatan Pembahasan APBD
37	Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan
12.	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
38	Sub Kegiatan Orientasi DPRD
39	Sub Kegiatan Pemdalaman Tugas DPRD
40	Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi DPRD
41	Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
42	Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
13.	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
43	Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
44	Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
45	Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses
14.	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD
46	Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
47	Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan keseluruhan anggaran sebesar Rp. 38.483.022.472,-dari keseluruhan anggaran yang berjumlah Rp. 28.148.498.899,-

Evaluasi berdasarkan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2024 pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, terdapat 5 (Lima) Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan atau tidak dapat dilaksanakan, yaitu Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Layanan Administrasi DPRD.

Lebih Lanjut Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Realisasi Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari 9 (sembilan) Kegiatan, adapun dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran yang tersedia Tahun 2024 sebesar Rp. 137,843,780,- dapat terealisasi sebesar Rp. 65,529,280,- atau persentase Pencapaian Realisasi Target Keuangan sebesar 47,54 % dan output dari rencana tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan jumlah anggaran yang tersedia Tahun 2024 sebesar Rp.4.144.735.685,- dapat terealisasi sebesar Rp.3.503.756.130,- atau persentase Pencapaian Realisasi Target Keuangan sebesar 84,54% dan output dari rencana tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran yang tersedia pada Tahun 2024 sebesar Rp. 404.212.660,- terealisasi sebesar Rp. 170.220.000,- atau persentase Pencapaian Realisasi Target Keuangan sebesar 42,11 % dan output dari rencana tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran yang tersedia pada Tahun 2024 sebesar Rp. 1.355.387.616,- terealisasi sebesar Rp.650.204.602,- atau persentase Pencapaian Realisasi Target Keuangan sebesar 47,97% dan output dari rencana tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran yang tersedia pada Tahun 2024sebesar Rp. 78.611.200,- dapat terealisasi sebesar Rp. 75.740.000,- atau persentase sebesar 96,35 % dan output dari rencana tersedianya tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran yang tersedia pada Tahun 2024sebesar Rp. 2.501.091.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 1.988.982.114,- atau persentase sebesar 79,52% dan output dari rencana tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran yang tersedia pada Tahun 2024 sebesar Rp. 344.478.768,- dapat terealisasi sebesar Rp. 165.629.765,- atau persentase Pencapaian Realisasi Target Keuangan sebesar 48,08 % dan output dari rencana tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
- h. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dengan Anggaran yang tersedia pada Tahun 2024 sebesar Rp.12.042.468.520,- dapat terealisasi sebesar Rp.10.663.019.072,- atau persentase Pencapaian

Realisasi Target Keuangan sebesar 88,55 % dan output dari rencana tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

- i. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD dengan anggaran pada Tahun 2024 sebesar Rp. 592.235.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 180.224.000,- atau persentase Pencapaian Realisasi Target Keuangan sebesar 30,43% dan output dari rencana tersedianya Layanan Administrasi DPRD dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugasfungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Adapun Kegiatan yang menunjang tugas dan fungsi DPRD yaitu terdiri dari 5 (lima) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan anggaran Tahun 2024 untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.204.144.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.546.790.345,- atau persentase Pencapaian Target Keuangan sebesar 70,18% dan output dari rencana tersedianya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
- b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan anggaran Tahun 2024 untuk kegiatan ini sebesar Rp. 660.326.100,- dapat terealisasi sebesar Rp.171.557.100,- atau persentase Pencapaian Target Keuangan sebesar 25,98% dan output dari rencana tersedianya Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
- c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dengan anggaran Tahun 2024 untuk kegiatan ini sebesar Rp.4.300.249.543,- dapat terealisasi sebesar Rp. 2.694.182.969,- atau persentase Pencapaian Target Keuangan sebesar 62,65% dan output dari rencana tersedianya Peningkatan Kapasitas DPRD dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.

- d. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan anggaran Tahun 2024 untuk kegiatan ini sebesar Rp.3.076.793.500,- dengan realisasi sebesar Rp.1.446.115.100,- atau persentase Pencapaian Target Keuangan sebesar 47,00% dan output dari rencana tersedianya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%.
- e. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD dengan anggaran Tahun 2024 untuk kegiatan ini sebesar Rp.6.640.444.000,- dengan realisasi sebesar Rp.4.826.548.422,- atau persentase Pencapaian Target Keuangan sebesar 72,68% dan output dari rencana tersedianya Fasilitasi Tugas DPRD dengan capaian realisasi fisik sebesar 100%. Adapun Realisasi Anggaran dan Fisik pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024

No	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp)	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	KEUANGAN					FISIK		SISA ANGGARAN		KET
				REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN		KAS	DPA			
				Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)					
				5	6	7	8	9	10	11	12		
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA													
4.02.01.2.01 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
01.0001	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	73.600.700	0,19	13.790.500	18,74	0,04	32,36	0,06	-	59.810.200			
01.0002	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	4.000.620	0,01	3.994.620	99,85	0,01	99,86	0,01	-	6.000			
01.0003	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	3.919.660	0,01	3.919.660	100,00	0,01	100,00	0,01	-	-			
01.0004	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.949.900	0,01	-	-	-	8,33	0,00	-	2.949.900			
01.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	2.513.300	0,01	2.513.300	100,00	0,01	100,00	0,01	-	-			
01.0006	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	48.795.100	0,13	39.302.700	80,55	0,10	82,09	0,10	-	9.492.400			
01.0007	EVALUASI KINERJA PERAGKAT DAERAH	2.064.500	0,01	2.008.500	97,29	0,01	98,60	0,01	-	56.000			
4.02.01.2.02 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
02.0001	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.925.467.385	10,20	3.332.227.830	84,89	8,66	84,84	8,65	-	593.239.555			
02.0003	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/ VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	216.600.000	0,56	168.860.000	77,96	0,44	78,84	0,44	-	47.740.000			
02.0005	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.668.300	0,01	2.668.300	100,00	0,01	100,00	0,01	-	-			
4.02.01.2.05 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
05.0002	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT PERLENGKAPANNYA	259.960.660	0,68	162.648.000	62,57	0,42	100	0,68	-	97.312.660			
05.0011	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	144.252.000	0,37	7.572.000	5,25	0,02	6,60	0,02	-	136.680.000			
4.02.01.2.06 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah													
1	06.0001	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	58.552.926	0,15	58.411.832	99,76	0,15	100,00	0,15	-	141.094		

No	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp)	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	KEUANGAN						FISIK		SISA ANGGARAN		KET
				REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN			KAS	DPA			
				Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)						
2	06.0002	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	355.265.315	0,92	110.610.125	31,13	0,29	57,69	0,53	-	244.655.190			
3	06.0003	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	96.876.485	0,25	61.356.405	63,33	0,16	63,56	0,16	-	35.520.080			
4	06.0004	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	175.396.150	0,46	105.523.000	60,16	0,27	62,20	0,28	-	69.873.150			
5	06.0005	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	88.415.740	0,23	24.000.000	27,14	0,06	26,26	0,06	-	64.415.740			
6	06.0006	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5.000.000	0,01	-	-	-	-	-	-	5.000.000			
7	06.0008	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	83.100.000	0,22	41.000.000	49,34	0,11	100,00	0,22	-	42.100.000			
8	06.0009	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	492.781.000	1,28	249.303.240	50,59	0,65	51,83	0,66	-	243.477.760			
4.02.01.2.07 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
	07.0002	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	78.611.200	0,20	75.740.000	96,35	0,20	100,00	0,20	-	2.871.200			
4.02.01.2.08 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														
	08.0001	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	178.923.234	0,46	161.772.200	90,41	0,42	70,17	0,33	-	17.151.034			
	08.0002	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	270.716.270	0,70	164.225.000	60,66	0,43	98,49	0,69	-	106.491.270			
	08.0004	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	2.051.451.496	5,33	1.662.984.914	81,06	4,32	84,04	4,48	-	388.466.582			
4.02.01.2.09 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	09.0001	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	71.567.699	0,19	9.231.000	12,90	0,02	14,35	0,03	-	62.336.699			
	09.0006	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	59.990.000	0,16	40.280.000	67,14	0,10	67,80	0,11	-	19.710.000			
	09.0009	PEMELIHARAAN / REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	212.921.069	0,55	116.118.765	54,54	0,30	99,53	0,55	-	96.802.304			
4.02.01.2.15 - Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD														
	15.0001	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	10.973.613.520	28,52	10.466.213.672	95,38	27,20	95,71	27,29	-	507.399.848			
	15.0002	PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	354.960.000	0,92	-	-	-	100,00	0,92	-	354.960.000			
	15.0003	PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD	713.895.000	1,86	196.805.400	27,57	0,51	30,12	0,56	-	517.089.600			
4.02.01.2.16 - Kegiatan Layanan Administrasi DPRD														
	16.0001	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN DPRD	152.009.700	0,40	29.763.500	19,58	0,08	19,87	0,08	-	122.246.200			

No	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp)	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	KEUANGAN		FISIK			SISA ANGGARAN		KET	
				REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN			KAS		DPA
				Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)				
16.0003	FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD	440.225.800	1,14	150.460.500	34,18	0,39	35,39	0,40	-	289.765.300		
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD												
4.02.02.2.01 - Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD												
2.01.0002	PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	2.016.947.300	5,24	1.546.790.345	76,69	4,02	78,05	4,09	-	470.156.955		
2.01.0004	FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN / KETERANGAN DAN/ATAU NASKAH AKADEMIK	187.197.300	0,49	0	-	-	0,00	-	0	187.197.300		
4.02.02.2.02 - Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran												
2.02.0001	PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	71.242.500	0,19	66.736.100	93,67	0,17	100	0,19	0	4.506.400		
2.02.0002	PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	73.229.400	0,19	69.536.000	94,96	0,18	100	0,19	0	3.693.400		
2.02.0003	PEMBAHASAN APBD	412.727.200	1,07	5.160.000	1	0,01	30,72	0,33	0	407.567.200		
2.02.0004	PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN	103.127.000	0,27	30.125.000	29,21	0,08	94,84	0,25	0	73.002.000		
4.02.02.2.04 - Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD												
2.04.0001	ORIENTASI DPRD	802.837.380	2,09	562.051.394	70,01	1,46	72,29	1,51	0	240.785.986		
2.04.0002	PEMDALAMAN TUGAS DPRD	532.170.000	1,38	281.112.000	52,82	0,73	56,90	0,79	-	251.058.000		
2.04.0008	PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN	2.083.460.807	5,41	1.526.550.549	73,27	3,97	89,76	4,86	-	556.910.258		
2.04.0005	PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	618.410.880	1,61	324.469.026	52,47	0,84	53,28	0,86	-	293.941.854		
2.04.0007	PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD	263.370.476	0,68	-	-	-	8,33	0,06	-	263.370.476		
4.02.02.2.05 - Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat												
2.05.0001	KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH	871.928.600	2,27	501.408.000	57,51	1,30	71,85	1,63	0	370.520.600		
2.05.0002	PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	433.396.000	1,13	325.445.200	75,09	0,85	79,07	0,89	0	107.950.800		
2.05.0003	PELAKSANAAN RESES	1.771.468.900	4,60	619.261.900	34,96	1,61	39,35	1,81	0	1.152.207.000		
4.02.02.2.08 - Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD												
2.08.0001	KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	6.640.444.000	17,26	4.826.548.422	72,68	12,54	74,12	12,79	0	1.813.895.578		
		38.483.022.472	100	28.148.498.899	73,15	71,68		77,95		10.171.875.573		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dipimpin oleh Seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Mempunyai tugas pokok “menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan”. Untuk Menjalankan tugas tersebut, Sekretariat DPRD Mempunyai Fungsi :

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur Pelayanan dan fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternative untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasiltasi DPRD dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (*bottomup*) maupun dari tingkat atas (*top-down*), sehingga peran serta masyarakat (*stakeholders*) sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

**Tabel 2.3 Pengukuran Kinerja Utama Sekretariat DPRD
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan dukungan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase fasilitas pembahasan Peraturan Daerah	83%	88%	92%	94%	92%	94%
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Tranparan dan Akuntabilitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	51 (C)	38,55 (C)	51 (CC)	56,25 (CC)	(60) B	(60,45) B

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum optimal. Masih terdapat beberapa permasalahan dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan Fungsi PD yang berkaitan dengan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
2. Belum optimalnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain, DPRD, LSM, Lembaga Masyarakat Tingkat Desa, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi dan Sektor Swasta.
3. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
4. Belum optimalnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Perubahan Peraturan Perundang-undangan, pedoman ataupun petunjuk teknis, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan sistem pelayanan dan fasilitasi kedewanan.

Dari permasalahan dan hambatan yang ada, tentunya dampak terhadap visi dan misi kepala Daerah yang telah tertuang di dalam RPJMD 2021-2026, yaitu : “Adanya keterlambatan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024”.

Adapun isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas antara lain:

- a. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- c. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD.
- d. Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah.
- e. Masih belum tersedianya fasilitas informasi yang mudah diakses masyarakat dalam aktivitas kinerja DPRD baik individu maupun lembaga.

Beberapa isu isu Penting selain dari isu isu yang terdapat dalam perangkat daerah adalah inovasi daerah dan pengarusutamaan Gender. Inovasi daerah merupakan isu penting dimana perangkat daerah wajib berinovasi guna mencapai tujuan Rencana Pembangunan Daerah dimana peran inovasi sebagai kunci keberhasilan penmbangunan daerah. Isu lain yang tidak kalah penting adalah Pengarusutamaan Gender, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) menjadi hal yang sangat krusial, guna mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, yang tujuannya untuk mewujudkan anggaran yang berkeadilan. Hal tersebut diatas juga menjadi “concern” tersendiri di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Kep. Anambas. Adapun kondisi pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kab. Kep. Anambas pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin
Di lingkungan Sekretaariat DPRD

NO	Jabatan	Laki – Laki	Perempuan
1	Esselon II	1	-
2	Esselon III	2	1
3	Esselon IV	1	
4	Jabatan Fungsional dan Pelaksana	10	8
Total		14	9

berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui jumlah PNS berdasarkan jabatan dan jenis kelamindilingkungan Sekretariat DPRD yaitu terdapat 1 orang pejabat eselon II adalah laki-laki, 2 menjabat eselon III laki-laki, hanya 1 orang perempuan yang menjabat eselon III, satu-satunya jabatan eselon IV diisi oleh 1 orang perempuan selanjutnya untuk jabatan fungsional dan pelaksana diisi oleh 11 laki-laki dan 8 perempuan.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Review terhadap rancangan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 menitikberatkan pada analisa kebutuhan tahun rencana. Perbandingan antara Rancangan RKPD Tahun 2026 dengan hasil analisa kebutuhan, terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Tahun 2026. Hal ini dikarenakan kegiatan dimaksud sudah dilaksanakan pada Tahun 2025. Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 ini dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas

NO	RANCANGAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					KET
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	KKA	PERSENTASE CAKUPAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100 Persen	17.719.056.334	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	KKA	CAKUPAN LAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA	100 Persen	20.065.275.349	
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	KKA	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	82.153.431	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	KKA	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan	100 Persen	102.269.663	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KKA	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	46.248.037	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KKA	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	63.966.480	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KKA	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.240.502	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KKA	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.240.502	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KKA	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.174.924	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KKA	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.320.150	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KKA	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.389.419	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KKA	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	

5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KKA	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.035.773	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	KKA	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.100.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KKA	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	22.392.531	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KKA	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	23.392.531	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KKA	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.672.245	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KKA	Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.750.000	
2.	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	KKA	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4.317.899.311	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	KKA	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	5.371.092.990	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KKA	Tersedianya Laporan yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Laporan	4.140.291.988	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KKA	Tersedianya Laporan yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Laporan	5.160.231.983	
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KKA	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	175.446.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KKA	Tersedianya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	208.644.875	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KKA	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.161.323	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KKA	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.216.132	
3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	KKA	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	193.601.535	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	KKA	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	295.000.000	
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	KKA	Tersedianya Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	98.617.855	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	KKA	Tersedianya Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	2 Paket	195.000.000	
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KKA	Tersedianya Dokumen Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	94.983.680	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KKA	Tersedianya Dokumen Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	100.000.000	
4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	KKA	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	580.256.582	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	KKA	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	1.246.748.750	

13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KKA	Tersedianya Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	47.427.870	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KKA	Tersedianya Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	74.999.000	
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KKA	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	91.848.324	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KKA	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	471.519.620	
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KKA	Tersedianya Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	49.877.568	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KKA	Tersedianya Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	60.877.568	
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KKA	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	120.841.450	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KKA	Tersedianya Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 Paket	235.841.452	
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KKA	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	30.137.110	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KKA	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	35.137.110	
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	KKA	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	12.150.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	KKA	Tersedianya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	15.120.000	
19	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KKA	Tersedianya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	47.311.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	KKA	Tersedianya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	62.311.000	
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKA	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	180.663.260	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKA	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	290.943.000	
5	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	KKA	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100 Persen	129.305.600	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	KKA	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100 Persen	75.000.000	
21	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KKA	Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	129.305.600	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KKA	Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	75.000.000	

6	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KKA	PERSENTASE PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 Persen	183.307.285	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	KKA	PERSENTASE PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 Persen	231.472.779	
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KKA	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	64.924.819	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KKA	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	75.924.919	
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KKA	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	98.382.466	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KKA	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	155.547.860	
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KKA	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KKA	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	-	
7	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	KKA	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 Persen	209.246.432	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	KKA	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 Persen	327.616.063	
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KKA	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 Unit	48.188.469	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KKA	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9 Unit	30.000.000	
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KKA	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	60 Unit	38.591.900	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KKA	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	60 Unit	77.150.000	
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KKA	Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	122.466.063	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KKA	Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	220.466.063	
8	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	KKA	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 Persen	11.856.459.258	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	KKA	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 Persen	12.262.705.200	

28	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	KKA	Tersedianya Dokumen yang menerima Hak Keuangan DPRD	20 Dokumen	11.149.113.520	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	KKA	Tersedianya Dokumen yang menerima Hak Keuangan DPRD	20 Dokumen	11.350.152.200	
29	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	KKA	Tersedianya Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	4 Paket	256.345.738	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	KKA	Tersedianya Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	4 Paket	302.909.000	
30	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	KKA	Tersedianya Dokumen Medical Check Up DPRD	20 Dokumen	451.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	KKA	Tersedianya Dokumen Medical Check Up DPRD	20 Dokumen	609.644.000	
9	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	KKA	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100 Persen	166.826.900	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	KKA	Persentase Layanan Administrasi DPRD	100 Persen	153.369.904	
31	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	KKA	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	73.127.857	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	KKA	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	50.000.000	
32	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	KKA	Tersedianya Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	93.699.043	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	KKA	Tersedianya Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	103.369.904	
2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	KKA	Persentase Capaian Penetapan Perda	100 Persen	9.277.520.401	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase Capaian Penetapan Perda	100 Persen	14.553.871.011	
10	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	KKA	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 Persen	1.228.599.713	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	KKA	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 Persen	2.750.629.822	
33	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	KKA	Tersedianya Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4 Perda	1.102.969.900	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	KKA	Tersedianya Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4 Perda	2.500.000.000	
34	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	KKA	Tersedianya Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	1 Dokumen	125.629.813	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	KKA	Tersedianya Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	1 Dokumen	250.629.822	
11	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	KKA	Persentase Pemenuhan	100 Persen	699.705.300	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	KKA	Persentase Pemenuhan	100 Persen	897.354.600	

			Pembahasan Kebijakan Anggaran					Pembahasan Kebijakan Anggaran			
35	Pembahasan KUA dan PPAS	KKA	Tersedianya Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	120.242.500	Pembahasan KUA dan PPAS	KKA	Tersedianya Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	122.477.000	
36	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	KKA	Tersedianya Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	123.229.400	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	KKA	Tersedianya Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	151.314.000	
37	Pembahasan APBD	KKA	Tersedianya Dokumen hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	246.224.400	Pembahasan APBD	KKA	Tersedianya Dokumen hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	373.563.600	
38	Pembahasan APBD Perubahan	KKA	Tersedianya Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	210.009.000	Pembahasan APBD Perubahan	KKA	Tersedianya Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	250.000.000	
12	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	KKA	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100 Persen	2.352.291.251	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	KKA	Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100 Persen	3.406.627.346	
39	Pendalaman Tugas DPRD	KKA	Tersedianya Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	934.000.000	Pendalaman Tugas DPRD	KKA	Tersedianya Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	1.114.256.550	
40	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	KKA	Tersedianya Dokumen Penyebarluasan Prodduk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Anggota DPRD	1 Dokumen	791.139.396	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	KKA	Tersedianya Dokumen Penyebarluasan Prodduk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Anggota DPRD	1 Dokumen	1.300.139.396	
41	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	KKA	Tersedianya Laporan Penyediaan tenaga Ahli	10 Laporan	420.036.240	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	KKA	Tersedianya Laporan Penyediaan tenaga Ahli	10 Laporan	616.887.600	
42	Penyusunan Program Kerja DPRD	KKA	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	207.115.615	Penyusunan Program Kerja DPRD	KKA	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	375.343.800	
13	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	KKA	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 Persen	2.007.535.180	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	KKA	Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 Persen	3.389.176.400	
43	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	KKA	Tersedianya Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	892.722.200	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	KKA	Tersedianya Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	1.123.145.200	
44	Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD	KKA	Tersedianya Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 Dokumen	288.852.611	Penyusunan Pokok Pokok Pikiran DPRD	KKA	Tersedianya Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 Dokumen	432.054.000	

45	Pelaksanaan Reses	KKA	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1 Dokumen	825.960.369	Pelaksanaan Reses	KKA	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1 Dokumen	1.833.977.200	
14	FASILITASI TUGAS DPRD	KKA	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100 Persen	2.989.388.957	FASILITASI TUGAS DPRD	KKA	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100 Persen	4.110.082.843	
46	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	KKA	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	1.900.770.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	KKA	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	2.551.463.886	
47	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	KKA	Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	1.088.618.957	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	KKA	Tersedianya Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	1.558.618.957	
					26.996.576.735					34.619.146.360	

Penjelasan dari tabel 2.4 diatas adalah terdapat 2 (dua) program dan 14 (empat belas) kegiatan sebagaimana pelaksanaan terhadap Renstra Sekretariat DPRD tahun 2021-2026. Sebanyak 14 kegiatan memiliki tingkat pencapaian sebesar 100% dari target yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda tahun 2021-2026. Dari rata-rata realisasi yang telah ditetapkan pada target setiap tahunnya menunjukkan bahwa capaian indikator telah mencapai target, namun tetap harus ada upaya dalam meningkatkan realisasi dari target yang telah ditetapkan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipati, proses *bottom-up* dan *top down*. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan *bottom up* dengan perencanaan yang bersifat *top down* sehingga di harapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipasi. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas diman realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan/Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum DKPD serta Musrenbang Tingkat Kota. Pada tahap Forum SKPD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD terkait.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun renja

SKPD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang di Koordinasikan oleh Bappeda. Tujuan dari pembahsan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indicator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, Provinsi maupun Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Untuk isu Gender Analisis Pathway (GAP) yang menjadi target pembangunan jangka menengah Daerah, Sekretariat DPRD mengakomodir beberapa Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan diantara lain adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Sekretariat DPRD mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 21.601.064.729,-. Tujuan kegiatan tersebut adalah meningkatkan peran serta perempuan dalam menjalankan produk pemerintahan.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dan Sub kegiatan Pelaksanaan Reses. Sekretariat DPRD mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 16.881.957.743,-. Tujuan kegiatan tersebut adalah meningkatkan peran serta perempuan dalam menyampaikan aspirasi kaum perempuan untuk berpartisipasi menjalankan pembangunan daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Agenda pembangunan nasional menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Kab. Kep. Anambas tahun 2026. Adapun agenda Pembangunan berdasarkan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, yaitu:

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi

Agenda pembangunan nasional selanjutnya dijabarkan secara lebih operasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sekretariat DPRD sebagai Penyedia Fasilitas DPRD dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD sebagai lembaga Legislatif terhadap pelaksanaan Kegiatan Pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat, sehingga peranan DPRD menjadi sangat luas dan penting bagi pembangunan Daerah khususnya Kabupaten Kepulauan Anambas.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

□ Tujuan

Tujuan Adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Untuk mencapai visi **“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera”** dan misi ke 3 (tiga) **Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi**, Sekretariat DPRD termasuk OPD yang memiliki peran untuk dapat mewujudkan visi dan misi tersebut. Dalam menunjang terwujudnya visi dan misi tersebut Sekertariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Rencana Kerja Tahun 2026 menetapkan Tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

“Meningkatkan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD”.

□ **Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Rancangan Renja ini adalah :

1. Meningkatnya fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah;
2. Meningkatnya fasiltasi pengawasan anggaran; dan
3. Meningkatnya dukungan pelayanan sekretariat DPRD terhadap peningkatan kinerja Anggota DPRD.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran (%)
Meningkatkan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya Fasilitasipembentukan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitasi Pencapaian Prolegda	100%

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai penyedia fasilitas bagi pelaksanaan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk mendukung semua kegiatan DPRD dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat sehingga sangat dibutuhkan Profesionalisme dalam pelaksanaannya.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai macam faktor yang menjadi pertimbangan yang disesuaikan dengan Tugas Pokok, dan Fungsi DPRD sebagai penyerap Aspirasi masyarakat yang akan di tuangkan dalam Peraturan Daerah yang

ditujukan demi kemakmuran masyarakat. Adapun Program dan Kegiatan yang dirancang Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- i. Layanan Administrasi DPRD

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

- a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
- b. Pembahasan Kebijakan Anggaran
- c. Peningkatan Kapasitas DPRD
- d. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- e. Fasilitasi Tugas DPRD

Direncanakan pada Tahun Anggaran 2026 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan melaksanakan 2 (Dua) Program dan 14 (Empat Belas) Kegiatan tidak jauh berbeda dengan tahun anggaran sebelumnya dengan kebutuhan anggaran sebagaimana hasil analisis kebutuhan sebesar Rp. 38.950.697.025,-.

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kedudukan Rencana Kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam rangka pencapaian visi dan misi yang pada gilirannya akan dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretariat DPRD dalam mewujudkan Sasaran OPD yakni Meningkatnya Kepuasan Layanan Fasilitasi terhadap Agenda DPRD dengan Indikator Indeks Kepuasan Layanan Administrasi dan Fasilitasi terhadap Pimpinan Agenda Pimpinandan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekretariat DPRD memiliki 2 (dua) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan. Kedua Program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Adapun Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2027 dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagai berikut.

**Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SEKRETARIAT DPRD						26.996.576.735,00							34.619.146.360,00	
4		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						26.996.576.735,00							34.619.146.360,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						26.996.576.735,00							34.619.146.360,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-				17.719.056.334,00						-	20.065.275.349,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				82.153.431,00						-	102.269.663,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	46.248.037,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		63.966.480,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	3.240.502,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.240.502,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	3.174.924,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.320.150,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.389.419,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.035.773,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENUA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN RAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Analisis Reaksi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Analisis Reaksi Kinerja SKPD				1 Laporan	22.392.531,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semur, Kesumala, Semur, Kab/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					22.392.531,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2.750.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semur, Kesumala, Semur, Kab/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.371.362.680,00			-	-	-	-	5.371.362.680,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/bulan	4.140.291.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semur, Kesumala, Semur, Kab/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.140.291.900,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Rekapitulasi dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	175.448.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semur, Kesumala, Semur, Kab/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		175.448.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.216.132,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semur, Kesumala, Semur, Kab/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.216.132,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05		Administrasi Keselamatan Perangkat Daerah	-	-			-	165.300.000,00			-	-	-	-	165.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05.0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1 Paket	58.817.855,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semur, Kesumala, Semur, Kab/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		58.817.855,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05.0011		Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	54.983.680,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semur, Kesumala, Semur, Kab/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		54.983.680,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN RAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SABARAK	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.02.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						500.255.500,00							1.246.740.700,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pencadangan Bangunan Kantor														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pencadangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Paket	47.127.870,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		47.969.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0002		Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Paket	51.844.800,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		471.510.600,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0003		Penyediaan Perabotan Rumah Tangga														
		Jumlah Paket Perabotan Rumah Tangga yang Disediakan					1 Paket	46.677.668,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.677.668,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1 Paket	120.841.460,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		225.841.462,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1 Paket	30.137.110,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.137.110,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0006		Penyediaan Bahan Baku dan Pembelian Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Pembelian Perundang-undangan yang Disediakan					1 Dokumen	15.120.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.120.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0007		Fasilitas Kunjungan Tamu														
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					1 Laporan	47.311.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		62.311.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0008		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SABARAK	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Jhusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Melayat Koordinasi dan Keselamatan SARFI				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UML/W (DMU)					250.840.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kinciranan Dinas Operasional atau Lapangan						125.305.600,00							75.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Pengadaan Jasa Pemangung Unsur Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pendanaan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	125.305.600,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UML/W (DMU)					75.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Pengadaan Jasa Pemangung Unsur Pemerintahan Daerah						180.307.965,00			-	-	-	-	281.472.770,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Pengadaan Jasa Surat Mengantar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Mengantar				1 Laporan	64.004.810,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UML/W (DMU)	-	-	-		75.004.610,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Pengadaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik														
	4.02.01.2.08.0004	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	50.002.465,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UML/W (DMU)					105.547.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						20.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UML/W (DMU)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Jhusan Pemerintahan Daerah						205.245.432,00							327.516.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Bangun Pemeliharaan, dan Pagar Kencan Perumahan Dinas atau Kantor "Anas Jabatan	Jumlah Kebutuhan Perorangan Dinas atau Kebutuhan Dinas Jabatan yang Diperkirakan dan ditanyakan Pagarinya				5 Unit	48.185.469,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UML/W (DMU)	-	-	-		30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0006	Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Diperkirakan				60 Unit	38.591.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UML/W (DMU)					77.150.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENYA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2028	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SABARAN	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.02.01.2.05.000		Perbaikan dan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi				1 Unit	100.493.063,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.493.063,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan UHRU						11.836.459.200,00							12.262.705.200,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.001		Pengembangan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Mendapat Hak Keuangan DPRD				20 Orang/Bulan	11.145.113.020,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.300.152.200,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.002		Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				4 Paket	200.345.720,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.309.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.003		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				20 Orang	401.300.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		609.944.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16		Layanan Administrasi DPRD						166.835.900,00							103.369.904,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16.001		Pengembangan Administrasi Keanggotaan UHRU														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Dokumen	73.127.867,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16.003		Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi UHRU														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				1 Laporan	53.690.043,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		103.369.904,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	-	-	-	-	-	8.277.520.401,00						-	14.563.871.011,00	
	4.02.02.01	Pembinaan Perilaku Daerah dan Peraturan DPRD						1.228.599.713,00							2.750.529.022,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.01.002	Pembinaan Bimbingan Peraturan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN RAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.01.0004		Jumlah Dokumen Hasil Pemecahan Masalah Perencanaan Penelitian Usahat				4 Dokumen	1.102.959.900,00	Kab. Kepulauan Anambas, Sumut, Kepulauan Seribu, KaltOesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
			Facilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik													
	1.02.02.2.02		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Proyek atau Kegiatan/Usahat/Usahat Akademik yang Efektifitas				1 Dokumen	125.829.613,00	Kab. Kepulauan Anambas, Sumut, Kepulauan Seribu, KaltOesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		250.829.622,00	SEKRETARIAT DPRD
	1.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	688.705.000,00			-	-	-		687.351.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001		Pembahasan KUA dan PPAE													
			Jumlah Dokumen Hasil Pemecahan KUA dan PPAE				1 Dokumen	120.242.500,00	Kab. Kepulauan Anambas, Sumut, Kepulauan Seribu, KaltOesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)					122.477.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAE													
			Jumlah Dokumen Hasil Pemecahan Perubahan KUA dan Perubahan PPAE				1 Dokumen	120.229.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Sumut, Kepulauan Seribu, KaltOesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		121.314.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003		Pembahasan APBD													
			Jumlah Dokumen Hasil Pemecahan APBD				1 Dokumen	246.224.400,00	Kab. Kepulauan Anambas, Sumut, Kepulauan Seribu, KaltOesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		378.593.600,00	SEKRETARIAT DPRD
	1.02.02.2.02.0004		Pembahasan APBD Perbaikan													
			Jumlah Dokumen Hasil Pemecahan APBD Perbaikan				1 Dokumen	210.309.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Sumut, Kepulauan Seribu, KaltOesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD													
			-	-			-	2.050.241.251,00			-	-	-		3.406.827.248,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002		Pencapaian Tugas DPRD													
			Jumlah Dokumen Hasil Pemecahan Tugas DPRD				1 Dokumen	584.000.000,00	Kab. Kepulauan Anambas, Sumut, Kepulauan Seribu, KaltOesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.114.258.550,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0003		Penyelesaian Tenaga Ahli Proka													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Ahli Riset				7 Orang	420.335.240.00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI LUM (DALU)	-	-	-		516.887.500.00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0007		Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	207.115.615.00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI LUM (DALU)	-	-	-		375.343.800.00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0008		Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				1 Dokumen	79.139.306.00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI LUM (DALU)	-	-	-		1.300.136.398.00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05		Berpartisipasi dan Perwakilan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	2.007.535.140.00			-	-	-		3.389.176.400.00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.0001		Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				1 Laporan	892.722.200.00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI LUM (DALU)	-	-	-		1.123.145.200.00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.0002		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 Dokumen	288.852.511.00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI LUM (DALU)	-	-	-		432.054.300.00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.0003		Pelaksanaan Rapat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Rapat				1 Dokumen	825.990.305.00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI LUM (DALU)	-	-	-		1.023.977.200.00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05		Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	2.548.385.267.00			-	-	-		4.110.082.543.00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.0001		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				1 Dokumen	1.500.770.000.00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI LUM (DALU)	-	-	-		2.551.463.885.00	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.0004		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i>				1 Dokumen	1.088.618.957,00	Kab. Kepulauan Anambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.558.618.957,00	SEKRETARIAT DPRD
J U M L A H									26.996.576.735,00						34.619.146.360,00	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi yang disusun secara sistematis, analistis dan koordinatif sehingga menghasilkan strategi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dimasa yang akan datang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Artinya Perencanaan Strategis akan membantu Organisasi ini untuk menentukan bagaimana mengerjakan sesuatu yang benar atau dibutuhkan (*Doing the right thing*) organisasi ini di masa yang akan datang.

Dengan Rancangan Rencana Kerja ini diharapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dapat meningkatkan eksistensi dan kapasitasnya dalam menjawab berbagai permasalahan dan tuntutan perkembangan lingkungan dan masyarakat di daerah, terutama dalam memberikan dukungan yang maksimal guna pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas yang menjadi mitra kerja Pemerintah Daerah. Hingga sejatinya dapat mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dan berdasarkan Motto Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu **“Kayuh Serentak Langkah Sepijak”**.

Tarempa, 21 April 2025

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kepulauan Anambas

